

Judul : Revisi UU ITE: Kunker, Komisi I Serap Masukan Masyarakat
Tanggal : Minggu, 11 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

UMKM Sulit Dapat SNI

Darmadi Soroti Ada Pungutan Liar Di BSN

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Duriyanto meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) menertibkan pungutan-pungutan liar dalam pengurusan dokumen Standardisasi Nasional Indonesia (SNI). Sebab, tak sedikit pelaku usaha mengeluh dikenakan tarif di luar ketentuan untuk percepatan penerbitan SNI.

Darmadi lalu menyoroti kinerja BSN dalam penerbitan SNI Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya masih sangat sedikit, hanya 145 ribu di tahun 2022. Padahal jumlah UMKM ini sangat besar, mencapai 65 juta.

"Kenapa kecil? Apa masalahnya?" heran Darmadi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Darmadi belum lama ini menggelar bimbingan teknis (bimtek) kepada sejumlah pelaku UMKM di daerah pemilihannya. Simulasi pelatihan yang juga dihadiri salah satu direktur di BSN ternyata gagal. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi

dan pemahaman BSN terkait sosialisasi ini ke pelaku usaha.

"Kalau 145 ribu (SNI Bina UMK), berarti sebulan itu cuma 12 ribu dari 65 juta," tegasnya.

Karena itu, dia meminta BSN jemput bola untuk SNI Bina UMKM ini. SNI ini sangat penting buat UMKM karena begitu diberi label SNI, maka daya saing dan nilai jual produk UMKM akan naik.

"Tapi masyarakat justru banyak yang nggak tahu. Dari peserta yang datang, hampir semua nggak tahu loh (SNI, red). Itulah kenapa butuh sosialisasi," katanya.

Bukan hanya SNI, pelaku usaha juga ternyata mengalami kendala untuk melakukan sertifikasi ke dalam *Online Single Submission* (OSS).

OSS bertujuan mempercepat pelaksanaan berusaha. Dia mendapati, UMKM yang terverifikasi dalam OSS ini baru mencapai dua jutaan. BSN mesti mempercepat pelayanan bagi UMKM ini.

"Terus bisa nggak dipermudah



Darmadi Durlianto

SNI Bina UMKM ini biar nggak ribet. Masuk-masuk daftar itu ribet loh. Kemarin kita coba dengan BSN saja, padahal yang datang direktur bersama stafnya, utak-atik komputer, nggak bisa," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Dia mengatakan, program

SNI Bina UMKM ini sebenarnya sangat bagus diterapkan. Adanya SNI, UMKM pasti akan lebih bangga dengan produknya. Kredibilitas UMKM naik, *trust* dari konsumen juga semakin baik. Kesempatan bagi UMKM untuk naik kelas juga semakin besar.

"Tapi kalau susah cara mendapatkannya, susah untuk *upgrade* UMKM kita," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyoroti besaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BSN tahun 2023 sebesar Rp 40,835 miliar. Jumlah ini naik sekitar Rp 5 miliar dari tahun sebelumnya.

Dia pun bertanya-tanya, apakah besaran PNBP ini naik karena BSN menaikkan tarif atau *fee* atas layanannya. Apalagi, dia mendapati ternyata setoran biaya LSPPro ke BSN untuk pelayanan SNI berkisar Rp 10 juta - 35 juta. Sementara LSPPro menarik biaya ke pelaku usaha sebesar Rp 40 juta - 50 juta.

LSPPro merupakan lembaga

Pemerintah ataupun swasta yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menentukan standar mutu produk.

"Tolong, pungutan liar di LSPPro ini ditertibkan. Usaha sekarang nggak mudah, apalagi habis Covid-19. Jadi mohon ditertibkan. Itu (LSPPro) kebanyakan swasta kan," katanya.

Darmadi mengaku banyak menerima aduan terkait tarif yang tidak wajar dalam pengurusan SNI ini. Apalagi LSPPro ini banyak yang menaikkan tarif hingga 100 persen dari tarif normal di BSN.

"Ada yang minta 60-70 juta. Biar cepatnya, 70 juta. *Rate*-nya beda-beda. Itu laporan mereka ke saya. Kalau saya tanya ke BSN pasti nggak. Semua normal. Jadi mohonlah dibantu diawasi yang di bawah itu," harapnya.

Sementara, Kepala BSN Kukuh S Achmad melaporkan capaian kinerja tahun 2022. Di antaranya, penyusunan 523 dokumen SNI, sehingga Indonesia memiliki total 12.165 SNI. ■ KAL